



## PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ; ----

-----**M E L A W A N** -----

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Penagadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 149/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. tanggal 13 Januari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/35/X/98 tanggal 08 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (P) umur 11 tahun;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (L) umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Adanya pihak ketiga dari Termohon
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2 tahun yang lalu , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, untuk dicatat perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pamulang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi

dengan bantuan Mediator ;

-----

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 02 Pebruari 2012 telah menetapkan dan menunjuk

**Drs. Hendi Rustandi, SH.** selaku Hakim Mediator ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 02 Pebruari 2012 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Pebruari 2012 tersebut gagal ;

-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan untuk petitum huruf C dicabut saja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui tentang dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sanggup memenuhi hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian, yaitu : Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat, yaitu : -----

- Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 534/35/X/98 yang dikeluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Pamulang tanggal 08 Oktober 1998, sesuai dengan aslinya,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan bermeterai cukup, siberi tanda (P.1) ;

-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon bernama **SAKSI I**, mengaku sebagai kakak kandung Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; mereka telah mempunyai keturunan 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu ; Pemohon suka curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ; benar sekarang Termohon lagi hamil dengan orang lain bukan dengan Pemohon sebagai suaminya ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; mereka sudah didamaikan, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak bisa rukun kembali ;

-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Termohon bernama **SAKSI II**, mengaku sebagai adik kandung Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; mereka telah mempunyai keturunan 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu ; Pemohon suka curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namanya Bkti ; benar sekarang Termohon lagi hamil dengan orang lain yang namanya Bkti, bukan dengan Pemohon sebagai suaminya ; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; mereka sudah didamaikan, tapi tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; mereka tidak bisa rukun kembali ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ‘ -----

Menimbang, bahwa hakim mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 24 Nopember 2011 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 tersebut telah gagal ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak Pemohon, yaitu **SAKSI I** (kakak kandung Termohon) dan **SAKSI II** (adik kandung Termohon), dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang puncaknya mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sehingga untuk merajut mawaddah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon atas alasan telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana percekocokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa pada perinsipnya segala macam penderitaan dalam hidup ini haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaan yang dirasakannya dengan cara menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perkecokan, dan atau apa yang menjadi penyebab perkecokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkecokan dan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa agama Islam lebih memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan nasehat serta upaya damai tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri terasa hampa. Mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon sama saja halnya menghukum mereka berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian bertentangan dengan rasa keadilan ;

-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon serta tidak ada upaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit dari mereka untuk kembali rukun dan bersatu, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan itu berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah), maka kepada Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum huruf C oleh karena telah dicabut oleh Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru jakarta Selatan tempat dilakukannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu setelah secara nyata Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) ;  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang tempat dilakukannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu setelah Pemohon secara nyata mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon ;  
-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan H. ROSMANI DAUD, S.Ag masing-masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Ketua,

ttd

**Drs MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. NURHAYATI**

Hakim Anggota,

ttd.

**H. ROSMANI DAUD, S.Ag**

Panitera Pengganti.

ttd

**NURMALASARI JOSEPHA, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Panggilan	Rp. 450.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 491.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)